

**PERAN PEMERINTAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
REHABILITASI HUTAN MANGROVE: KASUS DI KECAMATAN
PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS KALIMANTAN BARAT**
*(Government Roles and Community Participation in the Rehabilitation of Mangrove
Forest: A Case of Pemangkat Sub District Sambas Regency Wes Kalimantan,
Indonesia)*

Fitriadi*, Totok Gunawan, dan Rijanta****

*Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat

**Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi hutan mangrove dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Daerah penelitian adalah Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif. Responden penelitian terdiri dari masyarakat Desa Pemangkat Kota yang terlibat langsung dalam kegiatan rehabilitasi hutan mangrove dan aparat Pemerintah Daerah yang terkait dengan kegiatan rehabilitasi hutan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi lapangan dan wawancara mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah dalam rehabilitasi hutan mangrove Tanjung Bila, dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan adalah rendah. Hal ini disebabkan oleh kurang dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan, sikap apatis dari masyarakat, dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

Kata kunci : Peran pemerintah, partisipasi masyarakat, rehabilitasi

Abstract

The research was aimed to understand the Local Territory Government roles and the community participation on mangrove forest rehabilitation including factors that influenced community participation. The study area was Pemangkat Kota Village Pemangkat Sub District Sambas Regency West Kalimantan.

The methods used for this research were quantitative and qualitative methods, and were conducted through a descriptive analysis. The respondents were communities at Pemangkat Kota Village who were involved directly on the mangrove forest rehabilitation activities and the Local Governmental officials that linked to such activities.

The results show that both the roles of Local Government in the forest rehabilitation of Tanjung Bali and the respondent participations for planning process were low. The lack of involvement of societies on planning process, apathetic attitude of societies, and low level of societies education, and low income were factors that contributed to the condition.

Key words : government roles, community participation, rehabilitation.

PENGANTAR

Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem spesifik di sepanjang pantai laut daerah tropik yang uni dan mempunyai fungsi ekologis dan ekonomis. Kerusakan hutan mangrove di antaranya disebabkan tekanan dan pertambahan jumlah penduduk yang demikian cepat terutama di daerah pantai, mengakibatkan adanya perubahan tata guna lahan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berlebihan. Pemanfaatan ekosistem mangrove dapat berakibat berkurangnya ekosistem mangrove dan dapat memberikan dampak ekologis.

Luas hutan mangrove di Kabupaten Sambas adalah 9,460 ha yang tersebar di beberapa kecamatan diantaranya di Kecamatan Pemangkat. Kecamatan Pemangkat memiliki hutan mangrove seluas 550 ha yang keberadaannya sangat mengkhawatirkan akibat abrasi pantai, pembangunan tambak, dan penebangan oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya penyelamatan sedini mungkin melalui kegiatan rehabilitasi hutan mangrove, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Keberhasilan maupun kegagalan dalam rehabilitasi hutan mangrove tidak lepas dari peran pemerintah dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis memandang perlu mempelajari tentang peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi hutan mangrove. Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah mengetahui peran pemerintah dalam rehabilitasi hutan mangrove, dan mengetahui partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam rehabilitasi hutan mangrove.

Dalam program konservasi dan rehabilitasi hutan mangrove, Pemerintah lebih berperan sebagai mediator dan fasilitator (mengalokasikan dana melalui mekanisme yang ditetapkan), sementara masyarakat sebagai pelaksanaan diharapkan mampu mengambil inisiatif (Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, 2002).

Keterlibatan secara aktif dari masyarakat sangat menentukan dalam rangka keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan termasuk rehabilitasi hutan dan lahan. Soetrisno (1995) menyatakan bahwa partisipasi rakyat dalam pembangunan bukanlah mobilisasi rakyat dalam pembangunan. Partisipasi rakyat dalam pembangunan adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan dan membiayai pembangunan.

Pada saat ini telah dikembangkan suatu pola pengawasan pengelolaan ekosistem mangrove partisipatif yang melibatkan masyarakat. Ide ini dikembangkan atas dasar pemikiran bahwa masyarakat pesisir yang relatif miskin harus dilibatkan dalam pengelolaan mangrove dengan cara diberdayakan, baik kemampuannya (ilmu) maupun ekonominya. Pola pengawasan pengelolaan ekosistem mangrove yang dikembangkan adalah pola partisipatif meliputi: komponen yang diawasi, sosialisasi dan transparansi kebijakan, institusi formal yang mengawasi, para pihak yang terlibat dalam pengawasan, mekanisme pengawasan, serta insentif dan sanksi (Santoso, 2000).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perlu adanya kajian peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi hutan mangrove Tanjung Bila Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat.

CARA PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, ditentukan secara *purposive* berdasarkan pada pertimbangan bahwa daerah ini terletak di pesisir dan memiliki hutan mangrove dengan luas sekitar 550 ha serta telah dilaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan mangrove.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan metode kualitatif. Data primer berupa sosial ekonomi, partisipasi masyarakat, dan peran pemerintah, yang dikumpulkan langsung melalui wawancara, observasi, dan wawancara mendalam. Responden penelitian

adalah aparat pemerintah yang ditunjuk secara langsung dan masyarakat yang terlibat langsung dengan proyek rehabilitasi hutan dengan jumlah responden sebanyak 60 orang dari 60 populasi.

Analisis data dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan tabulasi frekuensi. Untuk menampilkan data secara deskriptif, dapat dilakukan tahap-tahap analisis data. Menurut Moleong (1997) secara umum terdapat tiga tahapan dalam analisis data yaitu: (1) Pemrosesan satuan (*unityzing*); (2) Kategorisasi; (3) Penafsiran data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Rehabilitasi Hutan Mangrove

a. Peran Pemerintah dalam Pendanaan

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sambas membuat usulan rencana biaya dan kegiatan rehabilitasi hutan mangrove dikarenakan tidak adanya usulan dari Pemerintah Kecamatan Pemangkat dan Pemerintah Desa Pemangkat Kota. Pada hal kondisi hutan mangrove Tanjung Bila cukup mengkhawatirkan karena maraknya penebangan hutan mangrove untuk pembangunan tambak, abrasi pantai dan pengambilan kayu oleh masyarakat. Semestinya Pemerintah Kecamatan Pemangkat dan Pemerintah Desa Pemangkat Kota membuat usulan kegiatan rehabilitasi hutan mangrove Tanjung Bila karena mereka merupakan komponen kelembagaan pemerintah yang terendah dan sehari-hari langsung berhadapan dengan masalah hutan mangrove Tanjung Bila. Hal ini menunjukkan kurang tanggapnya Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa terhadap perubahan dan kerusakan yang terjadi pada hutan mangrove Tanjung Bila.

Usulan yang diajukan hanya direalisasi sebesar 54,48% pada tahun anggaran 2000 dan 13,87% tahun anggaran 2001 dari total usulan anggaran yang diajukan untuk kegiatan rehabilitasi hutan mangrove Tanjung Bila. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah

untuk rehabilitasi hutan mangrove Tanjung Bila masih rendah.

Alokasi dana untuk kegiatan rehabilitasi hutan mangrove pada tahun 2000 hanya sebesar 8,81% dari total anggaran BRLKT Kapuas Tahun 2000, demikian pula halnya untuk kegiatan pemeliharaan rehabilitasi hutan yang dilaksanakan pada tahun 2001 hanya sebesar 2,19% dari total anggaran BRLKT Kapuas Tahun 2001. Hal ini menggambarkan bahwa perhatian pemerintah dalam mengalokasikan dana untuk kegiatan penanaman dan pemeliharaan rehabilitasi hutan mangrove Tanjung Bila masih rendah.

Bantuan insentif yang diberikan kepada kelompok tani untuk kegiatan penanaman hanya sebesar 23,46% dari total anggaran kegiatan penanaman. Kegiatan yang diserahkan kepada masyarakat hanya pada tahap pelaksanaan lapangan seperti pemasangan patok, pembuatan arah larikan, pembuatan jalur tanam, pemasangan ajir, angkutan bibit, penanaman, penyulaman dan pemeliharaan. Untuk kegiatan seperti pengadaan ajir, patok, papan nama dan gubuk kerja, pengadaan bibit dan lainnya masih dikelola oleh BRLKT Kapuas.

Demikian pula halnya dengan kegiatan pemeliharaan, total bantuan insentif yang diberikan kepada kelompok tani hanya sebesar 39,65% dari total anggaran kegiatan pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh masyarakat hanya pada pelaksanaan lapangan seperti pengangkutan bibit dan pemasangan ajir, penyulaman dan penyiangan, dan pemberantasan hama dan penyakit. Untuk kegiatan pengadaan bibit, ajir dan obat-obatan dilaksanakan oleh BRLKT Kapuas. Hal ini menunjukkan bahwa peranan BRLKT Kapuas dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan rehabilitasi hutan mangrove Tanjung Bila masih dominan.

Dalam pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan rehabilitasi hutan mangrove Tanjung Bila campur tangan pemerintah masih dominan. Menurut Syamsi (1986) menyatakan bahwa tanpa ikut campur tangan pemerintah,

pembangunan tidak akan dapat berhasil atau sekurang-kurangnya tidak dapat berjalan lancar.

b. Peran Pemerintah Daerah dalam Penentuan Luas Areal

BRLKT Kapuas di dalam membuat usulan rencana kegiatan rehabilitasi hutan mangrove Tanjung Bila didasarkan atas usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas. Usulan yang disampaikan dilengkapi dengan data dukung seperti sosial ekonomi masyarakat, kondisi fisik hutan, dan tingkat kerusakan hutanyang kemudian dilakukan penilaian. Berdasarkan penilaian BRLKT Kapuas, tingkat kerusakan hutan mangrove Tanjung Bila lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat kerusakan hutan mangrove lainnya yang ada di Kabupaten Sambas sehingga perlu dilakukan rehabilitasi. Namun data tentang berapa luasan kerusakan hutan mangrove Tanjung Bila masih belum terukur, data yang ada masih bersifat data kualitatif. Data ini ditunjang dari data luasan potensial dibandingkan dengan luasan aktual.

Luas potensial hutan mangrove Tanjung Bila adalah 880 ha dan luas aktualnya 550 ha, ini berarti terdapat 330 ha kawasan yang tidak berhutan. Dari luas 330 ha tersebut yang direhabilitasi hanya sebesar 100 ha atau 30.30% saja tidak sebanding dengan laju kerusakan hutan mangrove yang semakin bertambah akibat abrasi, penebangan hutan mangrove untuk pembangunan tambak, dan pengambilan kayu oleh masyarakat. Luas tambak yang ada di sekitar hutan mangrove Tanjung Bila pada tahun 2000 sebesar 508.4 ha dan bertambah menjadi 1,100 ha pada tahun 2002. Disamping itu adanya rencana Pemerintah Daerah untuk membangun jaringan irigasi tambak di kawasan hutan mangrove Tanjung Bila juga akan mendorong semakin maraknya pembangunan tambak yang dapat mengancam kelestarian hutan mangrove.

Memperhatikan hal tersebut di atas maka peran Pemerintah Daerah yang hanya merehabilitasi hutan mangrove Tanjung Bila seluas 100

ha dirasakan masih rendah, jika dibandingkan dengan laju kerusakan yang telah terjadi.

c. Peran Pemerintah dalam Penyuluhan

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan ternyata kegiatan penyuluhan yang berhubungan dengan rehabilitasi hutan mangrove yaitu bulan Nopember 2000 saa akan dilaksanakan penanaman dan bulan Nopember 2001 saat akan dilaksanakannya pemeliharaan rehabilitasi hutan mangrove, dengan frekuensi penyuluhan hanya satu kali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden pada instansi terkait yaitu Dinas Pertanian dan Kehutanan ternyata pelaksanaan kegiatan penyuluhan hanya dilaksanakan satu kali dalam satu tahun, hal ini karena keterbatasan anggaran yang ada pada instansi tersebut. Disamping itu berdasarkan informasi dari responden di Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan (Kapedalda) mengatakan bahwa Kapedalda juga melaksanakan kegiatan penyuluhan tentang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan pemasangan papan himbauan atau larangan untuk tidak melakukan penebangan hutan mangrove. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan beberapa instansi seperti Bappeda, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Badan Pertanahan, dan Dinas Perikanan dan Kelautan. Penyuluhan dilaksanakan di setiap kecamatan dengan frekuensi satu kali dalam setahun.

Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan satu kali dalam setahun dirasakan oleh masyarakat masih kurang. Kegiatan penyuluhan biasanya dilaksanakan di ibukota kecamatan yang hanya dihadiri oleh masyarakat yang berada di ibukota kecamatan, sedangkan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan seperti masyarakat yang tinggal di sekitar hutan mangrove Tanjung Bila dapat mengikuti penyuluhan. Masyarakat berharap agar pelaksanaan penyuluhan dapat menjangkau masyarakat yang tinggal di pelosok dan frekuensi penyuluhan perlu ditingkatkan.

Waktu pelaksanaan tidak hanya sekali ataupun dua kali tetapi membutuhkan waktu berkali-kali secara kontinyu. Pengertian dan pemahaman masyarakat tidak dapat hanya dicapai dengan waktu yang singkat tetapi membutuhkan waktu yang cukup panjang yang dilakukan secara berulang-ulang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa peran pemerintah dalam memerikan informasi tentang fungsi dan manfaat hutan mangrove serta arti pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove dirasakan masih rendah. Dengan demikian Pemerintah Daerah harus meningkatkan frekuensi penyuluhan dan penyuluhan tidak hanya dilaksanakan di ibukota kecamatan tetapi harus menjangkau masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

d. Tingkat Peran Pemerintah Daerah Dalam Rehabilitasi Hutan Mangrove Tanjung Bila.

Tingkat peran Pemerintah Daerah dalam rehabilitasi hutan mangrove Tanjung Bila diukur dengan persentase pendanaan, penentuan luas areal rehabilitasi, dan frekuensi pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Dari ketiga indikator tersebut ternyata peran Pemerintah Daerah dalam rehabilitasi hutan mangrove Tanjung Bila dirasakan masih rendah.

2. Partisipasi dalam Rehabilitasi Hutan Mangrove

a. Karakteristik Responden Penelitian

Usia responden sebagian besar berkisar antara 25-35 tahun sebesar 43.33% dan diikuti oleh usia dibawah 25 tahun sebesar 25.00%. Tingkat pendidikan responden sebagian besar berpendidikan sekolah dasar (SD) sebesar 88.33%. Lama tinggal responden di sekitar kawasan hutan mangrove didominasi antara 20-27 sebesar 45.00% dan diatas 30 tahun sebesar 40.00%. Jumlah anggota keluarga responden sebagian besar berkisar antara 4-5 jiwa sebesar 51.67% dan kurang dari 4 sebesar 41.67%. Tingkat pendapatan/penghasilan

responden perbulan sebagian besar dibawah Rp 300.000 sebesar 73.33% dan diantara Rp 300.000-500.000 sebesar 23.33%.

b. Perencanaan Rehabilitasi Hutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 100% tidak terlibat dalam penyusunan rencana kegiatan, biaya dan luasan areal yang akan direhabilitasi, penentuan jadwal kegiatan sebanyak 73.33% terlibat, dan penentuan lokasi kegiatan penanaman sebanyak 93.33% terlibat. Dari lima kegiatan perencanaan rehabilitasi hutan mangrove, responden hanya terlibat dalam dua kegiatan saja yaitu dalam penentuan jadwal dan lokasi penanaman. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan adalah rendah, peran Pemerintah Daerah masih dominan dan proses perencanaan rehabilitasi hutan masih bersifat *top down*. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan akan baik jika mereka dilibatkan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Conyer (1991) menyatakan bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek jika mereka dilibatkan dalam proses perencanaan karena akan lebih mengetahui selub belum proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki.

c. Penyuluhan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan jawaban yang diberikan responden ternyata 58,33% mengikuti kegiatan penyuluhan sebanyak dua kali, dan 28,33% yang mengikuti kegiatan penyuluhan hanya satu kali. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi responden dalam kegiatan penyuluhan adalah sedang.

d. Penanaman dan Pemeliharaan Hutan Mangrove

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden atas kegiatan penanaman dan pemeliharaan ternyata 96.67% pernah melakukan penanaman dan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan 43.33% dan 20.00% melakukan penanaman dan pemeli-

haraan secara swadaya. Ini berarti bahwa partisipasi responden dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun secara swadaya adalah rendah, meskipun 96.67% responden terlibat dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh pemerintah karena dalam pelaksanaan tersebut responden mendapatkan insentif dari pemerintah.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

a. Perencanaan Rehabilitasi Hutan

Partisipasi responden dalam perencanaan kegiatan, biaya dan luas areal yang akan direhabilitasi adalah 100% tidak terlibat, penentuan jadwal 73.33% terlibat dan dalam menentukan lokasi kegiatan adalah 93.33% terlibat. Umumnya ketidakterlibatan responden dalam perencanaan disebabkan oleh kekecewaan responden, sikap apatis responden, dan tingkat pendidikan yang belum memadai.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa sikap masyarakat dalam proses perencanaan rehabilitasi hutan masih belum menunjukkan sikap yang mendukung. Sikap yang ditunjukkan masyarakat sebagai wujud kekecewaan terhadap tidak diikutsertakan dalam proses perencanaan kegiatan, biaya dan luas areal yang akan direhabilitasi.

Sikap apatis juga ditunjukkan masyarakat terhadap proses perencanaan, mereka menganggap bahwa perencanaan rehabilitasi hutan merupakan wewenang pemerintah dan tidak perlu melibatkan masyarakat. Hal ini menunjukkan kurangnya pembinaan yang diberikan oleh pemerintah akan arti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan.

Disamping itu tingkat pendidikan responden juga mempengaruhi ketidakterlibatan dalam proses perencanaan. Tingkat pendidikan mereka yang belum memadai sehingga kurangnya rasa percaya diri yang menimbulkan perasaan minder. Kenyataan ini pulalah yang menyebabkan proses perencanaan rehabilitasi

hutan tidak diikuti oleh responden.

Peningkatan pendidikan masyarakat sangat diperlukan agar masyarakat dapat mendapatkan kepercayaan diri yang tinggi sehingga dapat memberikan usul, saran dan pendapat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, hal ini sesuai dengan penjelasan Tjokoamidjoyo (1996) dengan tingkat pendidikan yang memadai, individu dan masyarakat akan dapat memberikan partisipasi yang diharapkan.

b. Penyuluhan

Tingkat partisipasi responden dalam mengikuti penyuluhan adalah sedang. Hal ini disebabkan oleh jarak tempat tinggal responden jauh dari tempat penyuluhan dilaksanakan. Untuk menghadiri kegiatan penyuluhan mereka harus mengorbankan waktu dan mengeluarkan biaya sedangkan tingkat pendapatan mereka rendah dan waktu mereka habis untuk mencari nafkah sehingga mereka tidak dapat hadir dalam kegiatan penyuluhan.

c. Penanaman dan Pemeliharaan Hutan Mangrove

Partisipasi responden dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan adalah rendah. Hal ini disebabkan oleh dalam pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan mereka mendapatkan insentif, tingkat pendapatan responden rendah, dan tidak adanya kesempatan untuk berpartisipasi. Menurut sastropetro (1988) bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi beberapa faktor salah satunya adalah pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, kedudukan sosial dan percaya terhadap diri sendiri.

Menurut Slamet (1995) dalam Amba (1998) bahwa ada tiga syarat yang diperlukan agar masyarakat dapat berperan secara aktif dalam pembangunan diantaranya adalah harus ada kesempatan untuk berpartisipasi. Kesempatan adalah peluang yang tersedia bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam suatu kegiatan.

4. Evaluasi Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan Mangrove Tanjung Bila.

Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan sangatlah diharapkan baik dalam proses perencanaan maupun dalam pelaksanaan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dalam proses perencanaan kegiatan, biaya, dan luas areal yang akan direhabilitasi masyarakat tidak dilibatkan, mereka hanya dilibatkan pada saat penentuan jadwal dan penentuan lokasi kegiatan. Perencanaan kegiatan, biaya dan luas area yang akan direhabilitasi sepenuhnya dibuat oleh aparat Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam proses perencanaan masih dominan, perencanaan masih bersifat *top down*.

Dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan mangrove Pemerintah Daerah telah menyediakan dana. Dana untuk kegiatan rehabilitasi hutan bersumber dari dana reboisasi. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang bekerja sama dengan LSM Wapatar, dan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan mangrove dirasakan masih rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat tersebut disebabkan oleh tingkat pendidikan, pendapatan, dan tidak adanya kesempatan untuk berpartisipasi.

Untuk melestarikan hutan mangrove tidaklah cukup dengan pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove saja. Perlu adanya peraturan daerah yang mengatur tata ruang kawasan pesisir, penegakan hukum dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup termasuk hutan mangrove di Kabupaten Sambas dirasakan masih lemah, dan perlu adanya koordinasi antara dinas instansi yang terkait dalam pemberian perijinan pembangunan tambak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap peran pemerintah dan partisipasi masyarakat

dalam rehabilitasi hutan mangrove, maka dapat diperoleh kesimpulan :

1. Peran Pemerintah Daerah dalam rehabilitasi hutan mangrove Tanjung Bila sebagai berikut :
 - a) Proses perencanaan rehabilitasi hutan mangrove masih bersifat *top down*, dimana perencanaan kegiatan, biaya, dan luas areal yang akan direhabilitasi tidak melibatkan masyarakat.
 - b) Dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan mangrove peran pemerintah masih dominan.
 - c) Peran Pemerintah Daerah dalam kegiatan penyuluhan, alokasi dana dan luas areal yang direhabilitasi adalah rendah.
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi hutan mangrove sebagai berikut:
 - a) Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan kegiatan, biaya, luas areal, jadwal kegiatan dan lokasi penanaman adalah rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat umumnya disebabkan oleh kurang dilibatkan dalam proses perencanaan, sikap apatis masyarakat, dan tingkat pendidikan masyarakat yang masih belum memadai.
 - b) Partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan adalah sedang. Tingkat partisipasi masyarakat yang sedang ini umumnya disebabkan oleh jarak tempat tinggal yang jauh dari lokasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan, tidak adanya kesempatan untuk berpartisipasi, dan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah.
 - c) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan baik melalui program pemerintah maupun secara swadaya adalah rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanaman dan

pemeliharaan umumnya disebabkan oleh tingkat pendapatan masyarakat yang rendah dan tidak adanya kesempatan untuk berpartisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amba, Martha., 1998. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Hutan Mangrove (Studi Kasus di Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kotamadya Ambon, Maluku). *Tesis*. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Conyers, Diana. 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Suatu Pengantar*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial. Departemen Kehutanan, 2002. Kebijakan Departemen Kehutanan Dalam Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove. Fungsi dan Manfaatnya untuk kesejahteraan Masyarakat. *Workshop Rehabilitasi Mangrove Nasional Diselenggarakan oleh INSTIPER*. Yogyakarta.
- Moleong, J. Lexi. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Tarsito. Bandung.
- Santoso, N. 2000. Pola Pengawasan Ekosistem Mangrove. *Makalah Disampaikan pada Lokakarya Nasional Pengembangan Sistem Pengawasan Ekosistem Laut Tahun 2000*. Jakarta, Indonesia.
- Sastropoetro, Santoso. R, 1988. *Partisipasi Komunikasi Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*, Alumni. Bandung.
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Tjokroamidjodjo, Bintoro, 1996. *Perencanaan Pembangunan*. Gunung Agung Jakarta.